

**PERSEPSI GURU TERHADAP JANJI POLITIK PEMERINTAH TERKAIT
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SEKOLAH DI SMP PAB 23 BANDAR
KLIPPA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

San Mikael Sinambela, Joy Novi Yanti Lumbantobing, Mima Defliyanti Saragih,
Manotar Leryaldo Sinaga, Halking
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
sanmikaelsinambela@gmail.com, joylumbantobing44@gmail.com,
joylumbantobing44@gmail.com, manotarmanotar3@gmail.com,
halking123@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study was motivated by the gap between the government's political promises regarding equitable educational infrastructure and the actual conditions in the field. Unequal educational infrastructure, especially in suburban areas, poses a challenge to achieving fair and high-quality education. The main objective of this study is to analyze teachers' perceptions of the government's political promises regarding improving school infrastructure and to identify the factors that influence these perceptions. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation to gain an in-depth understanding of teachers' views on the realization of these political promises. The results of the analysis are expected to provide an overview of the extent to which schools have benefited from the government's political promises. This study implies the need for increased government transparency and accountability in the development of educational infrastructure, as well as strengthening the participation of teachers and the community in the process of evaluating educational policies.

Keywords: Teacher Perceptions, Political Promises, Educational Infrastructure

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara janji politik pemerintah mengenai pemerataan infrastruktur pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan. Infrastruktur pendidikan yang tidak merata, khususnya di wilayah pinggiran, menjadi tantangan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang adil dan berkualitas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi guru terhadap janji politik pemerintah terkait peningkatan infrastruktur sekolah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan guru terhadap realisasi janji politik tersebut. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran mengenai sejauh mana janji politik pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam

pembangunan infrastruktur pendidikan, serta memperkuat partisipasi guru dan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan

Kata Kunci: Persepsi Guru, Janji Politik, Infrastruktur Pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah sektor strategis dalam pembangunan suatu negara karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan penting untuk menjamin pendidikan yang merata dan berkualitas, termasuk melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan target pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN (Marzuki, 2021). Namun, implementasi kebijakan pendidikan di lapangan masih sering menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan kesenjangan fasilitas dan infrastruktur antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi ini tampak dari perbedaan kualitas sarana belajar, gedung sekolah, serta dukungan teknologi yang lebih mudah diperoleh sekolah di perkotaan dibandingkan sekolah di wilayah pedesaan atau pinggiran. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya

merumuskan kebijakan untuk pemerataan, realisasinya.

Janji politik pemerintah baik pusat maupun daerah seringkali muncul dalam kampanye dan rubrik kebijakan, terutama tentang pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah, seperti gedung yang layak, sarana pembelajaran memadai, dan lingkungan belajar yang aman. Meskipun demikian, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa sejumlah sekolah di daerah terpencil atau kurang berkembang masih belum memiliki sarana dasar ataupun bangunan yang representative (Sarnoto, 2012). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana komitmen politik tersebut terealisasi dan bagaimana persepsi pelaksana pendidikan di lapangan terhadap janji-janji tersebut.

Guru sebagai pelaksana langsung proses pembelajaran memiliki posisi strategis dalam mengevaluasi realisasi janji politik terkait infrastruktur sekolah. Persepsi guru terhadap kebijakan atau janji politik sangat penting karena akan mempengaruhi motivasi,

kepercayaan, dan keterlibatan mereka dalam proses perbaikan pendidikan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap kebijakan pendidikan seperti Kurikulum Merdeka, program sekolah penggerak, pendidikan inklusi, dan pengelolaan sarana sangat bervariasi tergantung kesiapan sarana, dukungan pemerintah, serta manajemen internal sekolah. (Esti Rahayuningsih, 2024)

Sarana dan prasarana sekolah (infrastruktur) mencakup aspek fisik, seperti ruang kelas, laboratorium, fasilitas kebersihan, listrik, air bersih, dan akses teknologi; serta aspek pendukung lain seperti perawatan dan pemeliharaan. Kekurangan atau ketidaksesuaian fasilitas ini sering dilaporkan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Misalnya dalam penelitian tentang pengelolaan sarana pembelajaran di SMK Nusatama Padang, guru menyatakan bahwa pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana belum optimal (Amilia Desnasari, 2021)

Meskipun terdapat regulasi dan janji politik yang jelas tentang peningkatan kualitas pendidikan dan pengalokasian bahan serta dana

untuk infrastruktur, beberapa studi menunjukkan adanya gap antara janji dan realisasi. Dalam artikel Konsep Politik Pendidikan di Indonesia, disebutkan bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas atau bahkan tidak memiliki ruang belajar yang layak meskipun pemerintah telah menetapkan standar pendidikan nasional. Penelitian tentang tanggung jawab pemerintah dan kesenjangan sosial dalam pendidikan juga menegaskan bahwa lokasi geografis, keterbatasan keuangan, serta kapasitas institusi pendidikan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mewujudkan janji-janji politik tersebut (Lega, 2023)

Dari kajian literatur yang ada, meskipun banyak penelitian tentang persepsi guru terhadap kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, pendidikan inklusi, dan program sekolah penggerak, sedikit dari penelitian tersebut yang secara khusus mengkaji persepsi guru terhadap janji politik pemerintah khusus tentang infrastruktur sekolah, dan lebih sedikit lagi yang mengambil studi kasus di SMP swasta khusus seperti SMP PAB 23 Bandar Klippa. Hal ini menjadi kekosongan yang

nyata: bagaimana persepsi guru terhadap janji politik itu sendiri (bukan hanya kebijakannya), apakah guru melihat bahwa janji tersebut sudah terealisasi, bagaimana perbandingannya antara harapan dan kenyataan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui persepsi guru di SMP PAB 23 Bandar Klippa terhadap janji politik pemerintah terkait peningkatan infrastruktur sekolah. Fokusnya adalah ke arah apakah guru percaya janji-politik tersebut terealisasi, apa saja indikasi realisasinya atau kekurangannya, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dipakai untuk mencari pengetahuan yang sedalam-dalamnya terhadap objek penelitian dalam masa tertentu (Syah, 2010). Penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif sangat cocok dengan penelitian ini karena peneliti akan membahas mengenai Persepsi Guru Terhadap Janji Politik Pemerintah Terkait Peningkatan

Infrastruktur Sekolah di SMP PAB 23 Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam metode kualitatif ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Yin dalam (Morissan, 2019) studi kasus merupakan suatu pengamatan empiris yang berdasarkan sumber-sumber bukti untuk meneliti suatu gejala kontemporer dalam konteks kehidupan nyata yang sebenarnya. Selanjutnya (Hardani, 2020) mengemukakan studi kasus (*case study*) adalah suatu metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data mengenai suatu kasus.

Dalam Penelitian ini, Berdasarkan judul penelitian yaitu Persepsi Guru Terhadap Janji Politik Pemerintah Terkait Peningkatan Infrastruktur Sekolah di SMP PAB 23 Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka lokasinya akan dilakukan di sekolah dengan lokasi yang telah tertera.

Subjek penelitian atau informan untuk penelitian kualitatif merupakan aktor-aktor yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013) dalam

penelitian kualitatif penggunaan populasi tidak digunakan, karena penelitian kualitatif berangkat dari gejala dan fenomena tertentu. Hasil kajian nantinya tidak akan dititik beratkan ke populasi, akan tetapi ditransfer pada permasalahan yang dikaji. Sehingga, dalam melakukan penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, teknik ini dipilih berdasarkan pengamatan dalam aspek tertentu. Sehingga dalam hal ini informan yang dipilih adalah pihak yang dianggap paling mengetahui mengenai penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dapat mempermudah objek yang diteliti. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah 3 orang guru dan 7 orang siswa. Dengan total 10 orang subjek penelitian dari SMP PAB 23 Bandar Klippa.

Dalam melakukan penelitian harus memiliki objek yang diteliti. Objek penelitian dapat berupa orang, objek, transaksi, atau peristiwa. Selanjutnya himpunan objek yang diteliti tadi disebut populasi. Dalam menganalisis populasi, peneliti memusatkan perhatian pada satu atau lebih karakteristik atau sifat-sifat objek. Karakteristik seperti itu disebut

sebagai variabel. Dalam penelitian yang menjadi variabel nya adalah guru dalam memberikan persepsinya terhadap janji politik oleh pemerintah terkait peningkatan infrastruktur sekolah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman langsung dari guru dan siswa mengenai realisasi janji politik pemerintah terhadap infrastruktur sekolah. Observasi digunakan untuk melihat kondisi nyata sarana dan prasarana secara langsung di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui foto, data sekolah, dan dokumen resmi lainnya seperti profil sekolah dan daftar fasilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen sekolah yang relevan

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berfungsi sebagai pengumpul data, penganalisis, serta penafsir hasil penelitian. Selain itu, digunakan

instrumen bantu berupa pedoman wawancara, kamera dokumentasi, dan catatan lapangan untuk mendukung keakuratan pengumpulan data.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman, melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan data penting dari hasil wawancara dan observasi. Pada tahap penyajian data, informasi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang terstruktur sehingga mudah dipahami. Tahap akhir adalah verifikasi data untuk menarik kesimpulan yang kredibel berdasarkan bukti yang valid. Selain itu, untuk meningkatkan keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sarana Sekolah

Berdasarkan keseluruhan tanggapan dari sepuluh responden, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana sekolah saat ini masih belum sepenuhnya memadai. Sebagian besar responden menilai bahwa

fasilitas yang tersedia di sekolah belum memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa secara optimal. Banyak sarana yang dianggap sudah tidak layak, kurang lengkap, atau bahkan mengalami kerusakan, sehingga memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Meskipun ada responden yang menilai bahwa kondisi sarana cukup baik, tetapi mereka tetap menegaskan perlunya peningkatan agar kualitas fasilitas semakin sesuai dengan standar pendidikan yang ideal.

Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa peningkatan sarana sekolah memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar siswa. Sarana yang lengkap dan memadai akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung, sehingga siswa lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar. Sebaliknya, sarana yang kurang memadai dapat menghambat proses pembelajaran dan menurunkan kenyamanan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sarana yang baik merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Selain itu,

responden menyoroti bahwa sarana sekolah saat ini belum merata peningkatannya. Ada ketimpangan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, termasuk antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Beberapa responden berharap agar program peningkatan sarana dilakukan secara adil dan tidak hanya berfokus pada sekolah tertentu saja. Pemerataan fasilitas menjadi penting agar setiap siswa, tanpa memandang jenis atau lokasi sekolahnya, dapat menikmati sarana pendidikan yang layak.

Secara umum, responden merasa bahwa ketersediaan sarana saat ini masih memerlukan perhatian serius. Banyak dari mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi sarana yang tersedia, mulai dari ruang kelas, alat pembelajaran, hingga prasarana pendukung lainnya. Mereka menilai bahwa peningkatan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat sementara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sarana sekolah selalu dalam kondisi baik dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan.

Dapat disimpulkan pula bahwa responden menganggap sarana sekolah sebagai aspek fundamental

yang sangat memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Tanpa sarana yang memadai, proses pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya perbaikan fasilitas yang lebih serius, terencana, dan tepat sasaran, agar sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan efektif bagi siswa

2. Prasarana Sekolah

Berdasarkan keseluruhan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa prasarana sekolah saat ini dinilai masih belum memadai dan membutuhkan peningkatan yang serius. Sebagian besar responden menyampaikan bahwa prasarana yang ada belum mampu mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Beberapa prasarana bahkan diketahui mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengurangi kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa prasarana sekolah masih menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Mayoritas responden menilai bahwa janji pemerintah terkait peningkatan prasarana sekolah belum

teralisasi secara maksimal. Walaupun ada responden yang melihat adanya pengaruh positif dari program pemerintah, namun keseluruhan penyampaiannya masih dianggap terbatas dan belum menyentuh seluruh kebutuhan sekolah. Banyak responden menyoroti bahwa pembangunan atau perbaikan prasarana yang dijanjikan pemerintah belum merata, sehingga masih terdapat sekolah-sekolah yang belum merasakan dampak nyata dari program tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan atau kesenjangan antara kebutuhan prasarana di lapangan dengan realisasi yang dilakukan pemerintah.

Selain itu, beberapa responden menekankan bahwa prasarana sekolah yang memadai sangat berpengaruh pada kenyamanan dan kondisi lingkungan belajar. Prasarana seperti ruang kelas, bangunan sekolah, toilet, area bermain, dan fasilitas pendukung lainnya dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa. Ketika prasarana berada dalam kondisi buruk atau tidak layak, hal tersebut dapat menurunkan kualitas pembelajaran

dan bahkan berpotensi membahayakan siswa. Oleh karena itu, peningkatan prasarana menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang proses pendidikan yang berkualitas.

Sebagian responden juga menyoroti perlunya pemerintah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi prasarana secara nyata, agar kebutuhan setiap sekolah dapat diidentifikasi secara tepat. Pendekatan semacam ini dianggap dapat membantu memastikan bahwa pembangunan prasarana benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Selain itu, responden juga berharap agar peningkatan prasarana dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat proyek sementara, sehingga kondisi prasarana dapat terus terjaga dan mendukung kegiatan belajar dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa prasarana sekolah merupakan aspek yang masih sangat membutuhkan perhatian dan peningkatan. Meskipun sebagian responden melihat adanya upaya pemerintah, namun mayoritas menilai bahwa realisasi program peningkatan prasarana masih jauh dari optimal.

Prasarana yang memadai diyakini mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, lebih aman, dan lebih mendukung bagi siswa. Dengan peningkatan prasarana yang tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan, kualitas pendidikan di sekolah dapat meningkat secara lebih signifikan

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap janji politik pemerintah terkait peningkatan sarana dan prasarana di SMP PAB 23 Bandar Klipa cenderung kurang positif. Mayoritas guru menilai bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum memadai dan belum mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal. Fasilitas yang tersedia dinilai banyak yang sudah tidak layak, rusak, atau kurang lengkap sehingga berdampak pada kenyamanan, motivasi belajar siswa, serta efektivitas kegiatan mengajar. Guru juga memandang bahwa realisasi janji politik pemerintah belum berjalan maksimal karena peningkatan fasilitas dianggap tidak merata, tidak sesuai kebutuhan nyata sekolah, dan belum sepenuhnya memenuhi standar pendidikan yang

diharapkan.. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara janji yang disampaikan pemerintah dengan kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi guru terhadap realisasi janji politik pemerintah. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi nyata sarana dan prasarana yang belum memadai, ketidakmerataan pembangunan antar sekolah, minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sekolah swasta, serta kurangnya pengawasan dan keberlanjutan program pembangunan. Guru juga menilai bahwa kurangnya keterlibatan pemerintah dalam meninjau langsung kondisi sekolah menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak selalu tepat sasaran. Dengan demikian, guru berharap agar pemerintah lebih serius, konsisten, dan berkelanjutan dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Pemerataan pembangunan, kejelasan implementasi program, serta perbaikan sarana dan prasarana yang tepat sasaran menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan guru terhadap janji politik pemerintah dan

menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi seluruh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia Desnasari, I. E. (2021). Persepsi Guru Terhadap Pengelolaan Sarana Pembelajaran Di Smk Nusantara Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4766-4770.
- Esti Rahayuningsih, M. (2024). Persepsi Guru Dan Siswa Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka (Perspektif Social Learning Theory (SlT). *Journal Of Education Research*, 2828-2839.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Lega, D. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidika. *Adil Indonesia Journal* , 54-67.
- Marzuki. (2021). Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16-39.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Sarnoto, A. Z. (2012). *Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia*. *Educhild*, 30-40.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syah. (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikasi*. Pekanbaru: Suska Pres.
- Damis, Damis, Surianti Surianti, Hasrianti Hasrianti, A. Rini Sahni Putri, and Aksal Mursalat. 2023. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Cempae." *Jurnal Ilmiah Wahana Laut Lestari (Jiwall)* 1(1): 12–21. Doi:10.33096/Jiwall.V1i1.313.
- Handayani, M., Imran, Ramadhan, I., Okianna, & Alhidayah, R. (2022). Analisis Peran Guru dalam Proses Pembelajaran pada Siswa Kelas III di MI Syuhada Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal*

- Kewarganegaraan, 6(3), 5173–5177.
- Hidayah, A., & Ramadhan, S. (2023). Pengaruh Insfrastuktur Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Mentari Journal of Islamic Primary School*, 1(4), 265–275.
- Ikhtisar. (2020). Janji Pendidikan di Indonesia. In *The World Bank*.
- Khalifah, H., Nurhattati, N., & Kamaludin, K. (2024). Systematic Literature Review: Persepsi Guru terhadap Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Journal on Education*, 7(2), 8929–8938. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7789>
- Mustika, B., & Hamidah, A. (2020). Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Berdasarkan Kajian Literatur Terkini Tahun 2020-2025: A Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Pendidikan MIPA*, 14(September), 723–731.
- Nur Dahyanti, Sylvi Marsella Diastami, Azra Humaira, & Tengku Darmansah. (2024). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 87–100.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Abdul. *Journal Of Islamic Education*, 2(4), 1147–1152.
- Sandriani, S., & Riofita, H. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15165–15169.
- Suhendra, A. J. Rate, A. M. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Peningkatan Infrastruktur Jalan Nasional Kabupaten Minahasa Utara. 1–12.
- Suyono, S., Triyani, A. N., Camelia, C., & Purba, N. W. (2022). Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Peroses Belajar Siswa. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(2), 211–218.

